

**PERAN GERAKAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

***ROLE OF WOMEN'S MOVEMENT IN DEVELOPMENT
IN BANDUNG BARAT DISTRICT***

Rafih Sri Wulandari

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

Rafihwulan12@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu fungsi pemerintah daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan fungsi tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membentuk wadah khusus untuk pemberdayaan perempuan dalam pembangunan yang di sebut dengan istilah gerakan perempuan membangun (GEMPUNGAN), hal ini dikarenakan pentingnya peran dan kontribusi perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan sangatlah besar. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Gempungan memiliki 4 fokus utama yaitu Keluarga berencana (KB) , Perlindungan perempuan dan Anak (PPA), Keluarga Sejahtera dan Perempuan Kepala Keluarga. Melalui program Gempungan perempuan di Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki peningkatan penghasilan guna membantu kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga ini memiliki korelasi dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu bangsa yang sejahtera. Hal penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan peran perempuan dalam pembangunan tersebut melalui pemberdayaan anggota gempungan. Dalam hal ini penulis bermaksud memberikan suatu gambaran tentang konsep pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan gempungan sebagai salah satu program pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Kata kunci: pembangunan, perempuan, pemberdayaan

ABSTRACT

One of the functions of the local government is to realize the welfare of society, to realize the function of the Bandung Barat Regency Government to form a special forum for women's empowerment in development called is Gerakan Perempuan Membangun (GEMPUNGAN), this is because the important role and contribution of women in realizing welfare is very high. Through the Office of Population Control for Family Planning for Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A), the earthquake has 4 main focuses, namely Keluarga Berencana (KB), perlindungan perempuan dan anak (PPA), prosperous families and female heads of families. Through the Women's earthquake program in Bandung Barat Regency, it is expected to have an increase in income to help family welfare. This family welfare has a correlation with the government's goal to realize the ideals of the nation namely a prosperous nation. Important things must be done to realize the role of women in the development through empowering earthquake members. In this case the author intends to provide an overview of the concept of empowerment that can be done to realize the purpose

of the earthquake as one of the West Bandung regency government programs to realize a prosperous society.

Keywords: *development, women, empowerment*

PENDAHULUAN

Perempuan sejatinya dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam pembangunan suatu bangsa. Perkembangan pemerintahan di era reformasi khususnya di Indonesia sudah tentu mendukung pemberdayaan perempuan. Adapun Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia terutama pembangunan ekonominya masih belum maju, yang direfleksikan oleh pendapatan per kapita dan derajat industrialisasi yang masih rendah, potensi ini masih belum direalisasikan sepenuhnya. Pemberdayaan perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor, yang sebagian bersifat langsung maupun tidak langsung hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dan keterampilan tiap perempuan masih rendah yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Peran perempuan dalam membantu kesejahteraan masyarakat ini mempunyai peranan yang sangat penting yang dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung, yang dimaksud faktor langsung adalah faktor ekonomi keuangan dan faktor budaya. Kedua faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya dalam mempengaruhi keputusan atau keinginan seorang wanita untuk menjadi pengusaha dan kemampuannya bertahan sebagai pengusaha. Walaupun faktor-faktor tidak langsung juga penting, tetapi yang sering dibahas di dalam literature mengenai kewirausahaan perempuan di Negara sedang berkembang adalah faktor-faktor langsung terutama latar belakang sosial dan budaya. Di antara banyak latar belakang sosial dan budaya yang mempengaruhi keberadaan perempuan pengusaha adalah terutama agama, tingkat pendidikan formal dan keahlian, umur,

etnis dan kebiasaan, status perkawinan, dan lokasi geografi.¹²

Salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga salah satu wadah organisasi perempuan yang ada di masyarakat. Seperti di Kabupaten Bandung Barat memiliki Gempungan. Gempungan merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Gempungan suatu organisasi yang berperan besar dalam masyarakat serta dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

TINJAUAN TEORITIS

Eksistensi perempuan di Indonesia jejaknya mulai terlihat sejak awal abad 20 ketika sekolah modern didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan organisasi modern didirikan oleh “kaoem bumiputera”. Hingga saat ini, hampir satu abad lamanya, perjuangan itu mengalami pasang surut. Bahkan apa yang disebut capaian tentang “Hak Perempuan” atau kesetaraan Gender, pada prinsipnya belum dapat menjawab problem kesetaraan perempuan itu sendiri.

Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional

¹²Nia Pusparini, Pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Jamika kecamatan bojongloa kaler(Bandung 2017)

antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Helen Tierney (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol 1, New York: Greenwood Press, h.153) Mansour Faqih dalam bukunya tentang Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 8-9) mengemukakan pengertian Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas.

Munculnya istilah kesetaraan Gender itu mengacu kepada tuntutan di masyarakat akan hak perempuan mendapatkan perlakuan yang sama, menurut ahli pengertian Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Nasaruddin Umar, 2010: 30 Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

1. AKSES; yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi anak didik adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk anak didik perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara atau tidak.
2. PARTISIPASI; Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di tempat yang sama atau tidak.
3. KONTROL; adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan tertentu sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.
4. MANFAAT; adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

Terkait tuntutan akan kesetaraan Gender tersebut maka ada faktor – faktor yang harus diperhatikan untuk mewujudkannya diantaranya melalui pemberdayaan yang diberikan kepada perempuan. Adapun Tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan tersebut menurut Ambar T. Sulistyani (2004:83-84) meliputi.

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang

diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat melakukan tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.

Prijono dan Pranaka, 1996 mendefinisikan pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah - masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (afektif, kognitif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa

memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut dalam masyarakat. (Teguh, 2004:80-81).

Pada hakikatnya kegiatan Pemberdayaan pasti memiliki tahapan jelas dan tidak mengikat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, setelah itu baru memonitor dari jauh. Disini kita bisa menyimpulkan bahwa pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sumodingningrat 2004:41 mengemukakan proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap.

Sejalan dengan Pendapat para ahli yang sudah dikemukakan diatas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membentuk Gempungan, yang dimana istilah ini tidak akan di temukan di kabupaten atau kota lainnya dan ini merupakan salah satu bukti usaha pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan tentunya melalui pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Peran Gempungan dalam Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat

Pemerintah pusat menerbitkan Kebijakan Inpres No. 9/2000 tentang perempuan dalam pembangunan, sebagai acuan memaksimalkan potensi perempuan dalam pembangunan. Dalam perjalanannya Bangsa ini mampu mencetak Banyak sosok perempuan yang berperan penting dalam proses pembangunan sebut saja Ibu Megawati Presiden perempuan pertama di Indonesia, ibu Sri Mulyani Indrawati yang merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi Direktur Bank Dunia, dan saat ini menjadi Menteri Keuangan RI untuk

kedua kali nya, Evita Legowo Dirjen Migas Kementerian ESDM tahun 2012, dan masih banyak sosok perempuan lain yang keberadaannya dalam ruang publik telah memberikan sumbangsih besar bagi bangsa dan negara ini.

Dari contoh diatas sudah jelas bahwa perempuan memiliki andil besar dalam pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, perhatian pemerintah pusat lainnya dapat terlihat dari di bentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA. Menteri Yohana, 2018 mengemukakan bahwa:

‘Perempuan berpotensi besar untuk membangun bangsa ini, oleh karena itu sangat perlu memberikan akses bagi perempuan untuk berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Perempuan harus diberi kesempatan untuk melakukan kontrol terhadap proses pembangunan. Dengan demikian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat terwujud dan pembangunan dapat berjalan dengan baik’.

Sejak Otonomi Daerah di berlakukan pemerintah Bandung Barat memiliki keleluasaan dalam membuat peraturan, dan kebijakan salah satu perhatian dari pemerintah kepada perempuan adalah dengan dibentuknya Gempungan, Gempungan ini di bawah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang pada awalnya program ini diadopsi atau *miniature* dari program sebelumnya yaitu P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) yang dinilai kurang efektif oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat untuk memberdayakan perempuan di Desa, karena program ini hanya terlaksana di 1 desa 1 RW per 1 Tahun dirasa terlalu

lama untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, Sehingga munculah program Gempungan ini sebagai penyempurna dari program P2WKSS. Melalui Program Gempungan sebagai ajang koordinasi dari seluruh SKPD dalam meminimalisir kemiskinan secara nyata. Gempungan sendiri memiliki 4 fokus utama yaitu :

1. Keluarga berencana (KB) ,
2. Perlindungan perempuan dan Anak (PPA),
3. Keluarga Sejahtera dan
4. Perempuan Kepala Keluarga.

2. Memperkuat peran Gempungan melalui Pemberdayaan

Kegiatan Gerakan perempuan membangun akan terselenggara dengan baik jika anggotanya memiliki kemampuan untuk berdaya, proses menjadi berdaya tersebut tentunya dilakukan lewat program pemberdayaan, Sumodingningrat 2004:41 mengemukakan dalam Rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Pemberdayaan Gempungan Bandung Barat masih belum maksimal hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia anggotanya yang mayoritas pendidikannya rendah, ibu-ibu rumah

tangga, janda-janda kurang produktif, yang anggotanya termasuk kedalam kategori kurang mampu, terkait hal ini pemerintah Bandung Barat sangat berharap program Gempungan ini dapat membantu memperbaiki taraf hidup anggotanya, hal yang harus dilakukan tentunya adalah program pemberdayaan baik melalui pelatihan ataupun pendampingan.

Pemberdayaan pada perempuan ini melalui kegiatan pelatihan berwirausaha guna memberikan pembelajaran dalam upaya meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan perempuan. Kegiatan pelatihan kewirausahaan diharapkan berdampak pada kemampuan/keberdayaan perempuan menciptakan lapangan kerja. Melalui pelatihan kewirausahaan dalam memanfaatkan potensi alam yang berada di lingkungan setempat, perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pelatihan kewirausahaan merupakan suatu langkah penting dan perlu dilakukan dalam rangka membentuk/ mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu program pelatihan ini akan berdampak dalam meningkatkan keterampilan bidang usaha dan mempunyai sikap jiwa kewirausahaan dan diharapkan akan mampu menciptakan kemandirian baik dalam sikap maupun dalam berusaha.

Program pelatihan kewirausahaan bertujuan agar perempuan mempunyai peningkatan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan wirausaha melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan. Keberhasilan penyelenggaraan program pelatihan kewirausahaan ini sangat ditentukan oleh kesadaran kelompok perempuan yang memerlukan peningkatan kemampuan berusaha dan keterampilan dirinya dalam memanfaatkan sumber potensi alam agar dapat mengolah dan memasarkan berbagai

macam jenis hal-hal di bidang tata boga sehingga diharapkan peserta mampu mengaplikasikan hasil belajarnya yang ditandai dengan adanya perubahan taraf hidup yang mencakup memperoleh pekerjaan/ menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha, peningkatan pendapatan, ekonomi, percaya diri dan mengikutsertakan orang lain dalam pemanfaatan hasil belajarnya dan berperan serta dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat.

Dalam kegiatan pelatihan usaha masih terdapat berbagai permasalahan termasuk di Gempungan sehingga tidak semua peserta pelatihan dapat melakukan kegiatan usaha karena berbagai kendala. Salah satu usaha yang dapat dikatakan sebagai jawaban permasalahan di atas adalah dengan mendirikan berbagai lembaga pelatihan dan keterampilan kerja. Atmodiwirio (2002:35) mendefinisikan pelatihan sebagai pembelajaran yang dipersiapkan agar pelaksanaan pekerjaan sekarang meningkat. Dalam hal ini, peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian dan ketenagakerjaan wanita adalah mengembangkan ketenagakerjaan secara mandiri dan terpadu yang diarahkan terutama pemberdayaan perempuan untuk peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan upah pekerja, menjamin kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat, serta melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi.

Berdasarkan permasalahan di atas maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan hal ini dapat dilakukan oleh Dinas Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Bandung Barat ini sendiri

dinas tersebut mencanangkan program Gerakan Perempuan Membangun (Gempungan). Sasaran awal dari program Gempungan ini adalah membentuk Gempungan di setiap Desa sementara baru ada 48 Desa dan bertambah secara bertahap hingga menysasar 165 desa yang ada di Bandung Barat . Gempungan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan di masyarakat dengan diberikan pelatihan kewirausahaan sesuai pada potensi sumber daya yang ada, contoh yang sudah ada adalah di Desa Gunung Masigit diberikan pelatihan untuk membuat industri rumahan dengan membuat makanan ringan yang menggunakan bahan baku hasil pertanian setempat seperti pisang yang diolah menjadi keripik kemudian dikemas menarik dan memiliki nilai jual yang baik. Pprogram Gempungan ini selaras dengan program pemerintah pusat yaitu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

DAFTAR PUSTAKA

- Craig, G dan M. Mayo. 1995. Community empowerment: A reader in participation and devolopment. London: Zed Books.
- Mardikanto, Totok. 2015. Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Penerbit ALFABETA.
- Maria Eni Surasih,2006 Pemerintahan Desa dan Implementasinya, Jakarta: Erlangga,
- VISI PGTK PAUD dan DIKMAS - Vol. 12, No. 1, Juni 2017 45
- Nia Pusparini, 2017 Pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan kesejahteraan keluarga di kelurahan jamika kecamatan bojongloa kaler,PKM
- Siaran Pers Nomor: B-163/Set/Rokum/MP 01/09/2018
- 1945 : Undang-Undang Dasar 1945
- 1958 : Undang-Undang No.68 Tahun 1958

UU No. 7 Tahun 1984 dan Instruksi
Presiden No. 9 Tahun 2000

(Pengutamaan
dalam Pembangunan)

Gender